



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Agustus 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. ANSHARY MK.**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **78178**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/120 m² di ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 645 m²/120 m² di BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/144 m² di ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/60 m² di ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 329.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, AVANZA 1,3 GM/T MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 11B2D1 M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 180.182.782**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.409.182.782**III. HUTANG** Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.409.182.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.